



LAPORAN KINERJA 2022



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) merupakan pertanggungjawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance), maka perlu penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Laporan Kinerja OPD Tahun 2022 sebagai media akuntabilitas, media hubungan kerja organisasi dan media informasi umpan balik perbaikan kinerja Perangkat Daerah.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022, serta Penetapan Kinerja Tahun 2022 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* di masa mendatang.

Akhirnya diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja di waktu yang akan datang dapat lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Makassar, Januari 2023
/ **Plt. KEPALA DINAS**

/ **Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE.,MM**
Pangkat : Pembina Utama Madya /IVd
NIP : 196506061990032011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Singkat Organisasi	2
1.2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi	2
1.2.2 Struktur Organisasi	2
1.2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	6
1.2.4 Tantangan dan Peluang	9
1.2.5 Isu-isu Strategis.....	8
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	 10
2.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023	10
2.1.1 Visi	10
2.1.2 Misi	11
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	11
2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan	12
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
2.3 Perjanjian Kinerja	15
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 17
3.1 Indikator Kinerja.....	18
3.2 Capaian Kinerja Tahun 2021	18
3.3 Realisasi Anggaran.....	46
3.4 Instrumen Pendukung.....	42
 BAB IV PENUTUP.....	 49

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Tingkat Pendidikan ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan	6
TABEL 1.2	Tingkat Kepangkatan dan Golongan ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.....	7
TABEL 1.3	Jumlah ASN berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin.....	7
TABEL 1.4	Sarana dan Prasarana Pendukung.....	8
TABEL 2.1	Tujuan dan Sasaran.....	12
TABEL 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	13
TABEL 2.3	Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	14
TABEL 2.4	Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	15
TABEL 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	16
TABEL 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	17
TABEL 3.2	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	18
TABEL 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	19
TABEL 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra dan Standar Nasional.....	19
TABEL 3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	21
TABEL 3.6	Perbandingan Antara Target dan Realisasi	22
TABEL 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	23
TABEL 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra dan Standar Nasional.....	23
TABEL 3.9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	25
TABEL 3.10	Perbandingan Antara Target dan Realisasi.....	26
TABEL 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	27
TABEL 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra dan Standar Nasional	27
TABEL 3.13	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	29

TABEL 3.14	Perbandingan Antara Target dan Realisasi.....	30
TABEL 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	31
TABEL 3.16	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra dan Standar Nasional	31
TABEL 3.17	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	33
TABEL 3.18	Perbandingan Antara Target dan Realisasi.....	34
TABEL 3.19	Nilai Hasil dan Evaluasi.....	35
TABEL 3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	36
TABEL 3.21	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra dan Standar Nasional.....	36
TABEL 3.22	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
TABEL 3.23	Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022	40
TABEL 3.24	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Persasaran Strategis	47
TABEL 3.21	Analisis Efisiensi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.....	48



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip *good governance*. Agar *good governance* menjadi kenyataan dan sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Dalam rangka pembangunan *good governance*, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama akan fokus pada upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Singkat Organisasi

1.2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi

Membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

1.2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur N0. 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah tanggal 29 Desember 2021. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

b. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan dinas.

1. Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.
2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.

3. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

c. Bidang Hubungan Masyarakat Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Hubungan Masyarakat Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis hubungan masyarakat, informasi dan komunikasi publik. Bidang Hubungan Masyarakat Informasi dan Komunikasi Publik dalam menjalankan Rencana Aksinya dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

1. Sub Koordinator Pengelolaan dan Penyediaan Informasi yang mempunyai tugas membantu Kepala bidang Hubungan Masyarakat Informasi dan Komunikasi Publik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan penyediaan informasi.
2. Sub Koordinator Pengelolaan Media Komunikasi Publik yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Informasi dan Komunikasi Publik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan media Komunikasi publik.
3. Sub Koordinator Layanan Informasi Publik yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Informasi dan Komunikasi Publik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis layanan informasi publik.

d. Bidang Aplikasi dan Informatika

Bidang Aplikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis aplikasi dan Informatika. Dalam menjalankan Rencana Aksi Bidang Aplikasi dan Informatika di bantu oleh kelompok Jabatan Fungsional Terdiri dari :

1. Sub Koordinator Piranti Keras dan Infrastruktur Jaringan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis piranti keras dan infrastruktur jaringan.

2. Sub Koordinator Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala bidang Aplikasi dan Informatika dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis piranti lunak dan pengembangan aplikasi.
3. Sub Koordinator Pengelolaan Data dan *E-Government* yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data dan *e-government*.

e. Bidang Statistik

Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis statistik sektoral. Dalam menjalankan Rencana Aksinya Bidang Statistik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

1. Sub Koordinator Ekonomi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Statistik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis statistik ekonomi.
2. Sub Koordinator Sosial Budaya yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Statistik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis sosial budaya.
3. Sub Koordinator Politik Hukum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Statistik dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis statistik Politik Hukum Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

f. Bidang Persandian

Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis persandian meliputi tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi dan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian. Dalam menjalankan Rencana Aksinya Bidang Persandian dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

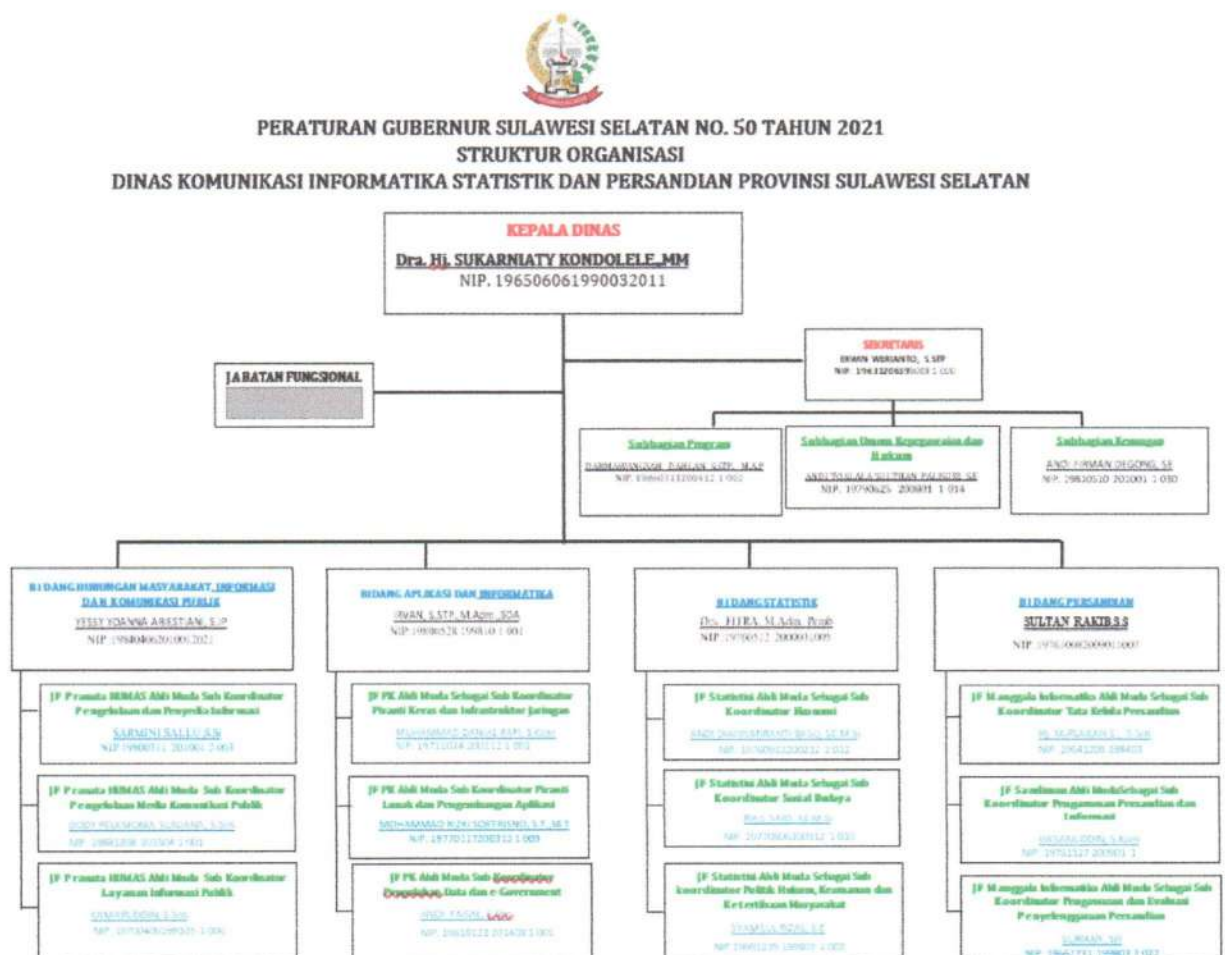
1. Sub Koordinator Tata Kelola Persandian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Persandian dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis tata kelola persandian

2. Sub Koordinator Pengamanan Persandian dan Informasi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Persandian dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengamanan persandian dan informasi.
3. Sub Koordinato Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Persandian melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

g. Jabatan fungsional

1. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Gambar 1.1



1.2.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan harus didukung oleh SDM yang kompeten dan berkualitas. Jumlah Pegawai di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebanyak 83 orang dengan tingkat Pendidikan bervariasi. Adapun Jumlah ASN berdasarkan tingkat Pendidikan diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan ASN

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah ASN
1	SLTP	3
2	SLTA	12
3	DIII/DIV	3
4	S1	50
5	S2	15
	JUMLAH	83

Sumber : Data Kepegawaian Diskominfo SP

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat Pendidikan ASN di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian didominasi oleh lulusan Sarjana S1 dan S2. Sedangkan tingkat kepangkatan dan golongan ASN pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.2 Tingkat Kepangkatan dan Golongan ASN

No.	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV/d	-
2	IV/c	1
3	IV/b	3
4	IV/a	12
5	III/d	24
6	III/c	8
7	III/b	14
8	III/a	12
9	II/d	2
10	II/c	2
11	II/b	2
12	II/a	1
13	I/d	1
14	I/c	-
15	I/b	1
16	I/a	-
	JUMLAH	83

Sumber : Data Kepegawaian Diskominfo SP

Tabel 1.3 Jumlah ASN berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

NO.	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	1	4
3	Eselon IV	11	3	14
4	Sandiman	2	-	2
5	Pranata Humas	6	4	10
6	Arsiparis	-	4	4
7	Pustakawan	-	3	3
8	Pelaksana	15	30	45
	Total			83

Sumber : Data Kepegawaian Diskominfo SP

b. Sarana dan Prasarana Pendukung

Saat ini aset-aset yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan berada dalam keadaan baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan / Kondisi	
			Baik	Kurang Baik
1	Alat-Alat Angkutan	29	26	3
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	543	419	124
3	Alat Studio dan Alat Komunikasi	101	71	30
4	Bangunan Gedung	-	-	-
5	Jaringan	5	5	-
6	Buku Umum	50	50	-

Sumber : Data Aset Diskominfo SP

1.2.4 Tantangan dan Peluang

a. Tantangan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi dan diuraikan sebagai berikut.

1. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat dan tepat
2. Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat
3. Penguatan peran PPID Utama dan PPID pembantu dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas.
4. Masih kurangnya SDM yang memiliki sertifikat nasional dalam bidang TIK
5. Meningkatnya kebutuhan bandwidth terkait peningkatan kebutuhan akses sistem dan aplikasi untuk mempercepat pelayanan publik.
6. Trend pelayanan urusan pemerintahan yang berbasis layanan teknologi informasi dan telekomunikasi.

7. Belum terintegrasinya data statistik sektoral.
8. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi.

b. Peluang

Selain tantangan, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian juga mempunyai peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya antara :

1. Telah Tersusunnya master Plant IT Prov.SulSel
2. Adanya regulasi yang mendukung pengembangan teknologi informatika dan komunikasi;
3. Adanya komitmen pemerintah daerah terhadap Penerapan *e-Government* ;
4. Terlaksananya Bimtek SPBE yang berkelanjutan;
5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi SPBE;
6. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengaduan publik;
7. Tersedianya sarana peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
8. Pemanfaatan media massa, baik media cetak maupun elektronik dan online, untuk menyampaikan hasil kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Semakin majunya teknologi keamanan sistem informasi dalam penanganan tindak kejahatan cyber (*cyber crime*);
10. Optimalisasi Big Data sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan;
11. Komitmen semua unsur Dinas Kominformasi SP dalam melaksanakan tugas

1.2.5 Isu Strategis

Keberhasilan suatu instansi bergantung pada bagaimana instansi itu sendiri merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu-Isu Strategis yang melingkupi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut:

- Pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik
- Keterbukaan informasi yang belum sepenuhnya terlaksana
- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Akses masyarakat terhadap informasi publik.
- Pengamanan informasi Pemerintah Daerah
- Perkembangan teknologi informasi
- Program satu data indonesia



BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023

Rencana strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disusun sebagai langkah perjalanan Rencana Strategis Organisasi Satuan Perangkat Kerja Daerah yang di *Break Down* dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan (2018-2023) yang telah memuat tujuan, kebijakan, program pembangunan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan Renstra Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 diarahkan sebagai langkah akselerasi dan mensinergikan perencanaan sebagai tahapan penguatan, perluasan, pendalaman dan sekaligus penyempurnaan dari pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, utamanya dalam mewujudkan Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter.

2.1.1 Visi

Visi misi Gubernur Sulawesi Selatan pada perencanaan periode 2018-2023 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Dalam RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 tertuang visi Gubernur Sulawesi Selatan yaitu :

**“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif
dan Berkarakter”**

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni, inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Ke empat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjelmakan provinsi Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”, “terkoneksi”, “mandiri dan sejahtera”, “sehat dan cerdas” serta “berkarakter”. Berdasarkan pemahaman itu maka penjelasan visi RPJMD Sulawesi Selatan 2018-2023 yaitu:

- Inovatif* : Kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru dan layanan baru yang memberikan nilai tambah yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Kompetitif* : Kemampuan menghasilkan SDM, Produk Barang dan Jasa yang mampu terserap oleh pasar.
- Produktif* : Kemampuan untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang berdayasaing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
- Inklusif* : Kondisi sistem dan lingkungan yang ramah untuk semua tanpa hambatan
- Berkarakter* : Spirit Pembangunan berdasarkan agama dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan.

2.1.2 Misi

Pencapaian Visi Kepala Daerah dalam RPJMD diwujudkan dalam 5 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi Melayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Dari 5 (lima) misi Pembangunan Gubernur Sulawesi Selatan yang telah dijelaskan di atas, yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Misi ke-1 yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif**.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Misi ke-1 Gubernur Sulawesi Selatan yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif** selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1	Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik melalui Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan TIK Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
		Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik
		Meningkatnya Implementasi e-Government Pada Layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang terintegrasi
		Meningkatnya data statistik Sektoral yang tersedia dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	Persentase Ketersediaan data Statistik Sektoral dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan.
		Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah Prov. Sulsel	Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD
			Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah
			Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik
			Persentase Temuan Material

Sumber : Renstra Diskominfo SP 2018-2023

2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi dan kebijakan dari organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2018- 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik melalui Penerapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Meningkatkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi serta mempermudah Akses Informasi Publik	Mewujudkan ketersediaan dan Meningkatkan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika untuk mendukung Fokus Pembangunan Pemerintah
	Meningkatnya Implementasi e-Government Pada Layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Meningkatkan Aplikasi layanan publik yang terintegrasi	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pemanfaatan TIK
	Meningkatnya data statistik sektoral yang tersedia dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	Standarisasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Satu Data dalam Mendukung Perencanaan dan evaluasi pembangunan
	Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah Prov. Sulsel	Pembangunan dan Penerapan fungsi Identifikasi, Proteksi, Penanggulangan dan Pemulihan di Bidang Keamanan Informasi	Meningkatkan Pengembangan dan Penerapan Teknologi Keamanan dan Sarana Pendukung Keamanan Informasi
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah & Sumber Daya Manusia Aparatur	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Koordinasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan **Nomor : 800.08/304/Diskominfo-SP** tanggal 15 Februari 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan TIK Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	$\frac{\text{Jumlah OPD yang Menerapkan TIK}}{\text{Jumlah Seluruh OPD}} \times 100 \%$	Bidang Aptika
2.	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Badan Publik	Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik
3.	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah Aplikasi Pemerintahan Yang terintegrasi}}{\text{Jumlah Aplikasi Pemerintahan}} \times 100\%$	Bidang Aptika
4.	Persentase data statistik sektoral yang tersedia dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	$\frac{\text{Jumlah data OPD Yang Terkumpul}}{\text{Jumlah Data Seluruh OPD Yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Bidang Statistik
5.	Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)	Nilai Indeks KAMI	Bidang Persandian

Berdasarkan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah mengukur pencapaian masing-masing indikator di akhir Tahun Anggaran 2022. Hasil capaian masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4 Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN	HASIL CAPAIAN	SUMBER DATA
1.	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan TIK Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	85%	97%	Bidang Aptika
3.	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	73	98,21	Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik
4.	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi	75%	75%	Bidang Aptika
6.	Persentase data statistik sektoral yang tersedia dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	90%	90%	Bidang Statistik
7.	Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)	30%	33%	Bidang Persandian

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan Anggaran atau DPA. Berikut merupakan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 yaitu :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	73
2.	Meningkatnya Implementasi e-Government Pada Layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi	75%
3.	Meningkatnya Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	90%
4.	Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah Prov. Sulsel	Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)	30%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	78
		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%
		Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%
		Persentase Temuan Material	0%



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Renstra Tahun 2018 – 2023.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90%	Tinggi
3	66 % s.d 75%	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Penghitungan persentase capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi

- (1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}^{**})}{\text{Rencana}^{**})} \times 100\%$$

- (2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(\text{Rencana}^{**}) - (\text{Realisasi}^{**}) - \text{Rencana}^{**})}{\text{Rencana}^{**})} \times 100\%$$

3.1 Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan berkesinambungan yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Pengukuran Kinerja mencakup antara lain :

- Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
- Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

3.2 Capaian Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Sasaran ini didukung oleh Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator dengan analisis pencapaian sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator Nilai keterbukaan Informasi Badan Publik, dilihat dari tabel Berikut :

Tabel 3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	73	98,21	100%

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 1 pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa target pada tahun 2022 tercapai lebih dari 100% dengan kriteria sangat baik.

Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik, pada tahun 2022 Kategori Informatif dengan nilai 98,21 dan mencapai target yang telah ditetapkan. Pencapaian nilai ini sangat signifikan, hal ini didapatkan karena adanya kerja keras PPID Utama dan tetap menjaga keharmonisan serta korelasi dengan PPID Pelaksana.

Awal tahun 2022 PPID Utama melakukan evaluasi mekanisme kerja PPID Utama untuk meningkatkan intensitas kegiatan PPID Utama. Pada tahun 2022 untuk menguatkan Kapasitasnya dilakukan bimbingan Teknis PPID sebanyak 2 kali dan pertemuan dalam bentuk FGD ada 4 kali, selain itu PPID Utama melakukan pembinaan secara langsung terhadap PPID Pelaksana di setiap Badan Publik.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Tahun tahun sebelumnya.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya untuk indikator kinerja Jumlah Layanan Media Publikasi Informasi Pemerintah Prov. Sulsel, Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik, Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi, Persentase OPD yang Terhubung Akses Internet yang Disediakan oleh Diskominfo SP Prov. Sulsel dilihat dari tabel Berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

INDIKATOR	2020	2021	2022
Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	72,85	72,55	98,21

Indikator di atas mengalami peningkatan dan telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra dan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Perbandingan		
	Realisasi 2022	Target Jangka Renstra	Target Nasional
Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	98,21	73	-

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian indikator kinerja tahun 2022 menunjukkan trend yang positif dimana dari tahun ke tahun capaiannya melebihi dari target yang ditetapkan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indikator Sasaran 1 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dikatakan berhasil dalam pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan yang dicapai dikarenakan kinerja dari seluruh stockholder Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi dan ketepatan dalam menentukan indikator serta target melalui perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Kegagalan dalam pencapaian indikator sasaran pada tahun 2022 hampir tidak ada, walaupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator sasaran ‘Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan’ masih terdapat beberapa kendala, akan tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan pelaksanaan program dan kegiatan telah berhasil sehingga indikator sasaran tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran ini adalah :

1. Website satu pintu PPID (website terintegrasi antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana) masih butuh pembenahan untuk kesempurnaan tampilan atau fitur.
2. Masih ada Kab/kota Prov,sulsel maupun OPD lingkup Pemprov, sulsel yang belum melaksanakan secara maksimal amanah UU No,14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Fasilitas pada Desk Layanan informasi publik masih butuh perhatian untuk memenuhi standar pelayanan informasi publik.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut :

1. Dinas Komunikasi- SP Prov, Sulsel harus melaksanakan pengembangan website satu pintu PPID melalui bidang Aplikasi dan Informatika
2. PPID Utama Pemprov. Sulsel Wajib meningkatkan kolaborasi dan sinergitas antara PPID Utama Kab/Kota dan PPID Pelaksana Lingkup Pemprov, Sulsel melalui pembinaan langsung dan Pelaksanaan Bimtek.
3. Dinas Kominfo-SP Pemprov, Sulsel wajib menganggarkan kebutuhan sarana yang akan mempercepat proses pelayanan informasi publik kepada masyarakat

d. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 (satu) Program dengan anggaran sebesar Rp.16.450.691.628,00 dengan realisasi sebesar Rp. 15.818.525.486,00 atau 96,16 % namun secara fisik telah terlaksana 100%. berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 3,84%.

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	URAIAN	ANGGARANTA. 2022	REALISASI	%
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	16.450.691.628,00	15.818.524.486,00	96,16%

e. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dilaksanakan oleh Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik. Program ini didukung 1 (satu) kegiatan, dengan 7 (Tujuh) sub kegiatan terdiri dari :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.
 - (1) Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik.
 - (2) Sub Kegiatan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah .

- (3) Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik.
- (4) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
- (5) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik.
- (6) Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
- (7) Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Implementasi e-Government Pada Layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Sasaran ini didukung oleh Bidang Aptika pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator dengan analisis pencapaian sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi dilihat dari tabel Berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi	75%	75%	100%

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 2 pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa target pada tahun 2022 telah tercapai 100% dengan kriteria sangat baik. Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi, pada implementasi e- government aplikasi pemerintah harus terpadu dan terintegrasi. Tahun 2022 aplikasi pemerintahan yang terintegrasi sebesar 75%, jumlah ini diperoleh dari 90 Aplikasi yang telah terintegrasi dari total 120 aplikasi yang ada dipemerintahan diharapkan dengan sistem aplikasi yang terintegrasi mampu meningkatkan efisiensi.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Tahun tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya untuk indikator kinerja Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi dilihat dari tabel Berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

INDIKATOR	2020	2021	2022
Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi	47%	74,07%	75%

Indikator di atas mengalami peningkatan, Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi pada implementasi e- government aplikasi pemerintah telah terpadu dan terintegrasi. Pada Tahun 2020 tercapai 47 %, tahun 2021 sebesar 74,07%, dan pada tahun 2022 sebesar 75 % terjadi kenaikan pencapaian.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra dan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Perbandingan		
	Realisasi 2022	Target Jangka Renstra	Target Nasional
Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi	75%	75%	-

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian indikator kinerja tahun 2022 menunjukkan trend yang positif dimana mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah DiLakukan

Indikator pada Sasaran 2 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dikatakan berhasil dalam pencapaian indikator sasaran yang telah

ditetapkan. Keberhasilan yang dicapai dikarenakan kinerja dari seluruh stockholder Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi dan ketepatan dalam menentukan indikator serta target melalui perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Kegagalan dalam pencapaian indikator sasaran pada tahun 2022 hampir tidak ada, walaupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator sasaran '**Meningkatnya Implementasi e- Government Pada Layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan**' masih terdapat beberapa kendala, akan tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan pelaksanaan program dan kegiatan telah berhasil sehingga indikator sasaran tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran ini adalah :

1. Masih terdapat perangkat daerah yg belum mengoptimalkan layanan jaringan internet Diskominfo Prov. Sulsel karena memanfaatkan layanan indihome.
2. Jumlah akses poin pada perangkat daerah masih sangat terbatas sehingga belum menjangkau keseluruhan area perangkat daerah.
3. Pembangunan dan pengembangan aplikasi oleh perangkat daerah masih belum terkoordinasi dengan baik oleh perangkat daerah pada diskominfo sesuai amanat pergub 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan TIK lingkup pemerintah daerah provinsi sulawesi selatan.
4. Peran aktif perangkat daerah pemerintah provinsi dalam pemenuhan evidence dan implementasi SPBE yang belum optimal.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut :

1. Peningkatan jumlah akses poin untuk optimalisasi layanan internet diskominfo dan pembatasan belanja penyediaan jaringan internet pada perangkat daerah dalam rangka efisiensi anggaran.
2. Pendistribusian akses poin secara proporsional pada setiap perangkat daerah.
3. Dalam pembangunan aplikasi diawali dengan presentase pembangunan aplikasi dan kewajiban bagi vendor dan perangkat daerah pengguna untuk mengintegrasikan dengan aplikasi lain sebagai syarat pemberian sub domain resmi pemerintah provinsi sulawesi selatan.

4. Penyiapan aplikasi untuk pemenuhan evidence dan tersosialisasi secara menyeluruh pada perangkat daerah pemerintah provinsi sulawesi selatan

d. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 (satu) Program dengan anggaran sebesar Rp. 7.201.931.202,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.103.670.224,00 atau 98,64% % namun secara fisik telah terlaksana 100%. berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 1,36%.

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	URAIN	ANGGARAN TA. 2021	REALISASI	%
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Pemerintah	7.201.931.202,00	7.103.670.224,00	98.64%

e. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah :

Program Pengelolaan Aplikasi Pemerintah dilaksanakan oleh Bidang Aplikasi dan Informatika. Program ini didukung 2 (dua) kegiatan, dengan 4 (empat) sub kegiatan terdiri dari :

1. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika

1 Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi

(1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

2 Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

(1) Sub Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.

(2) Sub Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

(3) Sub Kegiatan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.



Sasaran Strategis 3

Meningkatnya data statistik sektoral yang tersedia dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan

Sasaran ini didukung oleh Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator dengan analisis pencapaian sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator “Persentase data statistik sektoral yang tersedia dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan” dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.10

Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase data statistik sektoral yang tersedia dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	90%	90%	100%

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran 3 yaitu “Meningkatnya data statistik sektoral yang tersedia dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan”, indikatornya yaitu Persentase data statistik sektoral yang tersedia dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan tercapai 90% dengan kriteria Sangat Baik.

Untuk memperoleh ‘Persentase data statistik sektoral yang tersedia dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan’ dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{48}{53} \times 100 = 90 \%$$

Berdasarkan dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Bidang Statistik, maka Persentase data statistik sektoral yang tersedia dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan tahun 2022 adalah sebesar 90% dan telah mencapai target.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Tahun tahun sebelumnya

Perbandingan Persentase data statistik sektoral yang tersedia dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

No.	Indikator	2020	2021	2022
1.	Persentase data statistik sektoral yang tersedia dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	70%	80%	90%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian Persentase data statistik sektoral yang tersedia dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan 3(tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan. Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra dan Standar Nasional

Perbandingan capaian Persentase data statistik sektoral yang tersedia dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan tahun 2022 dengan Renstra dan Standar Nasional, telah mencapai target Renstra sebagaimana dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra dan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Target		
	2022	Target Jangka Renstra	Target Nasional
Persentase data statistik sektoral yang tersedia dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	90%	90%	-

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator “Persentase data statistik sektoral yang tersedia dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan” sesuai dari target yang telah ditentukan pada Renstra yaitu 90%.

c. **Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.**

Indikator pada Sasaran 3 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dikatakan berhasil dalam pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan yang dicapai dikarenakan kinerja dari seluruh stockholder Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi dan ketepatan dalam menentukan indikator serta target melalui perencanaan program dan kegiatan.

Kegagalan dalam pencapaian indikator pada sasaran 3 tahun 2022 hampir tidak ada, walaupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator sasaran '**Meningkatnya data statistik sektoral yang tersedia dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan**' masih terdapat beberapa kendala, akan tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan pelaksanaan program dan kegiatan telah berhasil sehingga indikator sasaran tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran ini adalah :

1. Pelaporan Data OPD lingkup Pemprov Sulsel yang tidak tepat waktu.
2. SDM pengelola data statistik sektoral OPD yang sering berganti.
3. Minimnya jumlah dan kualitas SDM pengelola data statistik sektoral yang memahami proses perencanaan, pengumpulan , pemeriksaan dan penyebarluasan data statistik dengan baik.
4. Persepsi dan pemahaman pimpinan yang masih berbeda-beda tentang statistik sektoral.
5. Sarana dan prasarana yang masih belum memadai.
6. Belum semua Kabupaten/Kota memiliki regulasi tentang satu data maupun forum satu data.
7. Belum terbitnya juknis format baku satu data dari pusat.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut :

1. Melakukan koordinasi/ menjemput bola dengan petugas pengelola data OPD lingkup Pemprov Sulsel.
2. Menunjuk SDM pengelola data statistik sektoral melalui SK Kepala Dinas dan Gubernur.

3. Diperlukan upaya dan komitmen pimpinan daerah menyusun perencanaan kebutuhan SDM pengelola data statistik sektoral di setiap perangkat daerah, serta melaksanakan pembinaan dalam bentuk Bimtek, FGD, dan sosialisasi bagi SDM bidang statistik OPD provinsi maupun kabupaten/kota.
4. Sosialisasi secara berkelanjutan terkait kebijakan statistik sektoral atau Satu Data Indonesia.
5. Perlu dukungan perencanaan anggaran untuk kebutuhan sarana dan prasarana statistik sektoral.
6. Sosialisasi tentang pentingnya regulasi tentang satu data maupun forum satu data.
7. Koordinasi dengan sekretariat satu data dan pembina data.

2 Analis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi selatan tahun 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 (satu) Program dengan anggaran sebesar Rp. 1.490.755.480.00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.302.665.381,00 atau 87,38%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 12,62%.

Tabel 3.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Uraian	Anggaran TA. 2020	Realisasi	%
1.	Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral	1.490.755.480.00	1.302.665.381,00	87,38%

3 Analis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah :

Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral, dilaksanakan oleh Bidang Statistik, Program ini didukung 1 (satu) kegiatan, dengan 6 (enam) sub kegiatan terdiri dari :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
 - (1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

- (2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- (3) Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektor
- (4) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektor
- (5) Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur
- (6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektor di Daerah



Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah Prov. Sulsel

Sasaran ini didukung oleh Bidang Persandian pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator dengan analisis pencapaian sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator “Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)” dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Antara Target dan Ralisasi

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)	30%	33 %	100%

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran 4 yaitu “Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)” dengan realisasi capaian 33%, Pada tahun 2022 telah mencapai target. Untuk mengukur Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI) menggunakan suatu aplikasi dengan tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009. Evaluasi dilaksanakan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi. Berdasarkan hasil penilaian tahun 2022 Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI) memperoleh nilai 32,7%.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Tahun tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

No.	Indikator	2020	2021	2022
1.	Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)	20 %	25%	33%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator “Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)” dari tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami peningkatan.

c. Perbandingan Realisasi kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Perbandingan capaian Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI) tahun 2021 dengan Renstra dan Standar Nasional, telah mencapai target Renstra sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Target		
	2022	Target Jangka Renstra	Target Nasional
Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)	33%	30%	-

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator “Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)” telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan pada Renstra yaitu 30%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah DiLakukan

Indikator pada Sasaran 4 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dikatakan berhasil dalam pencapaian indikator sasaran yang telah

ditetapkan. Keberhasilan yang dicapai dikarenakan ketepatan dalam menentukan indikator dan target melalui perencanaan program dan kegiatan. Kegagalan dalam pencapaian indikator pada sasaran 4 tahun 2022 hampir tidak ada, walaupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator sasaran 'Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah Prov. Sulsel' masih terdapat beberapa kendala, akan tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan pelaksanaan program dan kegiatan telah berhasil sehingga indikator sasaran tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran ini adalah :

1. Proses pelaksanaan Jaring Komunikasi Sandi antar organisasi Perangkat daerah masih secara manual.
2. Penguatan regulasi mengenai Layanan Persandian di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan belum tersedia.
3. Bukti dukung dan masih kurangnya Pemahaman dalam menganalisa Tools dan Instrument Audit keamanan, mengenai Keamanan Informasi.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut :

1. Pembuatan Website pilarpersandian.sulselprov.go.id yang digunakan dalam layanan Jaring Komunikasi Sandi lingkup Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pengajuan Draft Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan mengenai Penyelenggaraan Persandian di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pelaksanaan literasi, dokumentasi kegiatan, dan persuratan ke Organisasi Perangkat Daerah dalam hal Implementasi, Mitigasi, pada Keamanan Informasi sebagai peningkatan Penilaian dan pengisian Indeks Keamanan Informasi.

e. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi selatan tahun 2022 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 (satu) Program dengan anggaran sebesar Rp. 612.458.996.00 dengan realisasi sebesar Rp. 535.836.776,00 atau 87,49% . Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja fisik pada sasaran ini sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 12,51 %.

Tabel 3.17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Uraian	AnggaranTA. 2021	Realisasi	%
1.	Program Pemanfaatan Persandian dan Pengamanan Informasi	612.458.996.00	540.624.704,00	87,49 %

f. Analis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah :
Program Pemanfaatan Persandian dan Pengamanan Informasi, dilaksanakan oleh Bidang Persandian , Program ini didukung 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan terdiri dari :

1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - (1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.
 - (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.
 2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi Indikator Capaian Jumlah Layanan Jaringan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah dengan Target 3 Layanan dan realisasi 3 layanan.
 - (1) Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi.



Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran ini didukung oleh Bagian Sekretariat pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 4 (empat) indikator dengan analisis pencapaian sebagai berikut :

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator Nilai Sakip OPD, Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah, Persentase ASN Perangkat Daerah.

Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik dan Persentase Temuan Material dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.18
Perbandingan Antara Target dan Ralisasi

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Sakip OPD	78	78,50	100%
2	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
3	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	100%	100%
4	Persentase Temuan Material	0%	0%	100%

Berdasarkan pengukuran pencapaian Sasaran Strategis 5 pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa target pada tahun 2022 tercapai 100% dengan kriteria sangat baik, untuk Indikator Sakip OPD Tahun 2022 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi APIP memperoleh nilai 78,50.

a) Nilai Sakip OPD

Untuk memperoleh nilai SAKIP, yaitu melalui laporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah

tahun 2020 dan 2021 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.19
Nilai Hasil Evaluasi

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021
1	Perencanaan Kinerja	30	23,75	23,68	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30	16,25	19,06	23,10
3	Pelaporan Kinerja	15	10,78	10,78	11,55
4	Evaluasi Internal	25	6,72	6,82	19,25
5	Capaian Kinerja		15,61	13,67	
	Nilai Hasil Evaluasi	100	73,11	74,01	78,50
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	BB

Nilai SAKIP tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 dengan nilai 73,11 tahun 2020 dengan nilai 74,01 dan pada tahun 2021 dengan nilai 78,50 mengalami peningkatan sebesar 4,49

b) Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran belanja Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Prov. Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 14.129.205.362,00 dengan realisasi keuangan Rp. 13.576.505.588,00 atau 96,09% dan realisasi fisik 100% dengan jumlah 1 (satu) Program , 5 (lima) Kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan Dengan realisasi fisik yang 100% berarti Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah mencapai efisiensi anggaran sebesar 3,91 %.

c) Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik

Aparatur Sipil Negara pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2022 rata rata capaian Prestasi Kinerjanya berkategori baik dan sangat baik dengan capaian 100%.

d) Persentase Temuan Material

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022, temuan material berupa kelengkapan berkas administrasi. Namun seluruhnya telah ditindak lanjuti hasil temuan tersebut.

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Tahun tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu dan tahun sebelumnya untuk indikator kinerja.

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun sebelumnya

No.	Indikator	2019	2020	2021
1.	Nilai Sakip OPD	73,11	74,01	78,50
2.	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	100%
3.	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	100%	100%
4.	Persentase Temuan Material	0%	0%	0%

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator pada sasaran 4 mengalami peningkatan pada Nilai SAKIP OPD. Pada tahun 2019 memperoleh nilai 73,11 dan tahun 2020 memperoleh nilai 74.01 dengan kategori BB, dan tahun 2021 memperoleh nilai 78,50 dengan kategori BB.

c. Perbandingan Realisasi kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Perbandingan capaian Indikator sasaran tahun 2021 dengan Renstra dan Standar Nasional, telah mencapai target Renstra sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi kinerja Tahun Ini Dengan Renstra dan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja	Perbandingan		
		Realisasi 2021	Target Jangka Renstra	Target Nasional
1.	Nilai Sakip OPD	78,50	76	-
2.	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	-
3.	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	100%	-
4.	Persentase Temuan Material	0%	0%	-

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator pada sasaran sesuai dengan target yang telah ditentukan pada Renstra.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indikator pada Sasaran 5 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Penilaian untuk tahun 2021 telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Kegagalan dalam pencapaian indikator pada sasaran 5 hampir tidak ada, walaupun dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator sasaran ini, akan tetapi secara keseluruhan dapat dikatakan pelaksanaan program dan kegiatan telah berhasil sehingga indikator sasaran tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk peningkatan kinerja yaitu :

- Membangun budaya organisasi berorientasi pada akuntabilitas
- Meningkatkan evaluasi internal
- Menentukan target kegiatan dengan tepat
- Meningkatkan kualitas kinerja ASN
- Meningkatkan kualitas SDM ASN
- Meningkatkan tertib administrasi, tertib aturan dan tertib penggunaan Anggaran
- Mengikuti In House Training Implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
- Mengikuti Workshop Implementasi SAKIP di Jakarta
- Mengikuti Workshop Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Yogyakarta.
- Mengikuti Rapat Koordinasi evaluasi RB dan Sakip di Hotel Claro, Makassar Sulawesi Selatan.

e. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi selatan tahun 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 (satu) Program dengan anggaran sebesar Rp. 13,472,229,569.00 dengan realisasi sebesar Rp. 12,935,228,254.00 atau 96.01%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 100%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 3.99%.

Tabel 3.22
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Uraian	Anggaran TA. 2022	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	13,472,229,569.00	12,935,228,254.00	96,01%

f. Analis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah :
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi , Program ini didukung 5 (lima) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - (2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - (1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - (1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - (2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - (2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - (3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 3.23
Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	1. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan informasidan komunikasi publik	90%	90%
				Presentase tindak lanjut pengaduan pada Baruga Layanan Masyarakat secara Elektronik	100%	100%
				Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen
			Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi			
			- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	- Jumlah Aspirasi yang terkumpul	60	64
			- Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi	4 Laporan	4 Laporan
			- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	- Jumlah Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Publik	760 Konten	766 Konten
			- Pengelolaan Media Komunikasi Publik	- Jumlah Berita PadaPengelolaan Media	10.000 Berita	32.152 Berita
			- Pelayanan Informasi Publik	- Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Publik	7 Layanan	7 Layanan
			- Layanan Hubungan Media	- Jumlah Kerjasama Media Nasional - Jumlah Advetorial yang Dikelola	9 Media 50 Advetorial	9 Media 259 Advetorial
			- Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	- Persentase sengketa Informasiyang Diselesaikan	80 %	80 %

2.	Meningkatnya Implementasi e-Government pada Layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Percentage Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi	II. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	2,90 %	2,35
			Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan domain dan subdomain pada Pemprov Sulsel		1 Laporan	1 Laporan
			- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Kapasitas Bandwith Pada Pemerintah Prov.Sulsel		1700 Mbps	1700 Mbps
			Kegiatan Pengelolaan egovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Dalam Pengelolaane-Government		39 Opd	39 Opd
			- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	- Jumlah Aplikasi yang dibangun/dikembangkan dan dikelola		1.200 Mbps	1.200 Mbps
			- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	- Jumlah Aplikasi Yang Dikelola dan Dikembangkan	Aplikasi/website	76	203
			- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	- Jumlah Bimtek Kompetensi TIK yang diikuti		14 Kali	14 Kali
			- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	- Jumlah sumber Daya manusia yang meningkatkan kualitasnya dalam Bidang e- Government		100 Orang	150 Orang
				Jumlah Laporan Moitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	4 Laporan		4 Laporan
			III. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data Statistik Sektoral	80 %	80 %	
			3.	Meningkatnya Data Statistik Sektoral yang tersedia dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	Percentage Ketersediaan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan		

		<p>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral - Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi - Membangun Metadata Statistik Sektoral - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral - Pengembangan Infrastruktur - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 	<p>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Statistik Sektoral</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Data Statistik Sektoral - Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas SDM - Jumlah Laporan Penyediaan Data Informasi Yang Terstruktur - Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan - Jumlah Jenis Data terkait Infrastruktur Pemerintah Daerah - Jumlah Kegiatan Otorisasi Statistik Sektoral 	<p>5 Laporan</p> <p>20 Laporan</p> <p>15 Orang</p> <p>4 Laporan</p> <p>4 Laporan</p> <p>1 Jenis</p> <p>5 Kegiatan</p>	<p>5 Laporan</p> <p>20 Laporan</p> <p>16 Orang</p> <p>4 Laporan</p> <p>4 Laporan</p> <p>1 Jenis</p> <p>5 Kegiatan</p>
4	<p>Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah Prov. Sulsel</p>	<p>Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)</p> <p>IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</p> <p>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 	<p>Jumlah Area Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>Persentase Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian</p> <p>Jumlah Usulan Rancangan Peraturan Daerah Terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi</p>	<p>60 Persen</p> <p>6 Area</p> <p>1 Usulan Rancangan</p>	<p>60 Persen</p> <p>6 Area</p> <p>1 Usulan Rancangan</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah aparatur pemerintah daerah yang telah mendapatkan peningkatan kompetensi jumlah peserta penyelenggaraan forum komunikasi persandian daerah 	5 Orang	5 Orang
		<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Hasil Audit Keamanan Informasi di Lingkup Pemerintahan Daerah 	2 Laporan	2 Laporan
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Layanan Keamanan Informasi Yang Diterapkan 	2 Layanan	2 Layanan
		Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Jaringan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	3 Layanan	3 Layanan
		<ul style="list-style-type: none"> - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Entitas Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah 	3 jenis	3 jenis
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1. Nilai Sakip OPD 2. Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah 3. Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik 4. Persentase Temuan/Material	V. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baikdan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen
		Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	2 Laporan	2 Laporan

		<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah RKA dan DPA pokok dan perubahan yang disusundan ditetapkan - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Jumlah Laporan Administrasi Keuangan - Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN Perangkat Daerah - Jumlah laporan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD - Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian - Jumlah ASN yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Jumlah Pelaksanaan Rapat- rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD - Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Dokumen 12 Laporan 2 Laporan 12 Laporan 15 Laporan 1 Laporan 150 orang 2 Laporan 21 Unit 60 Kali 3 Laporan 	<ul style="list-style-type: none"> 4 Dokumen 12 Laporan 2 Laporan 12 Laporan 15 Laporan 1 Laporan 150 orang 2 Laporan 21 Unit 61 Kali 3 Laporan
--	--	--	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kendaraan dinas/jabatan yang dipelihara dan berizin roda 4 dan 2 	21 Unit	21 Unit
			<ul style="list-style-type: none"> - PemeliharaanRehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah gedung kantor yang dipelihara 	1 Unit	1 Unit
			<ul style="list-style-type: none"> - PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara 	59 unit	59 unit

3.3 Realisasi Anggaran

Rincian Anggaran yang dialokasikan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulawesi Selatan sebagai Berikut :

1. DPA Pokok

Belanja Operasi	: Rp.	38.226.274.728,00
Belanja Modal	: Rp.	2.473.667.300,00
Total	: Rp.	40.699.942.028,00

2. DPA Perubahan

Belanja Operasi	: Rp.	33.430.193.868,00
Belanja Modal	: Rp.	2.277.763.800,00
Total	: Rp.	39.707.957.668,00

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan serta pencapaian target rencana kinerja juga ditentukan oleh ketersediaan anggaran dimana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan mengelola dana APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 39.885.042.668,00** Realisasi Anggaran sebesar **Rp. 38.337.203.455,00** dengan persentase **96.12 %** dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 1.547.839.213,00** Uraian belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut.

Belanja Operasi :

a. Rencana Kerja Anggaran OPD

Besaran belanja operasi pada Anggaran pokok Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 38.226.274.728,00** dan pada Anggaran Perubahan sebesar **Rp. 37.682.033.918,00**

b. Pelaksanaan Anggaran

Realisasi anggaran belanja operasi sebesar **Rp. 36.218.764.813,00** atau **96,12%**

c. Sisa Anggaran

Sisa Anggaran pada Belanja operasi adalah sebesar **Rp. 1.463.269.105,00**

Belanja Modal :

a. Rencana Kerja Anggaran SKPD

Besaran belanja modal pada anggaran pokok adalah sebesar **Rp. 2.473.667.300,00** dan Pada Anggaran Perubahan sebesar **Rp. 2.203.008.750,00**

b. Pelaksanaan Anggaran

Realisasi anggaran belanja modal sebesar **Rp. 2.118.438.642,00** atau **96,16%**

c. Sisa Anggaran

Sisa Anggaran pada Belanja modal adalah sebesar **Rp. 84.570.108,00**

Adanya selisih realisasi terhadap anggaran diakibatkan karena sisa lebih pembiayaan anggaran kegiatan, serta adanya efisiensi biaya dalam melaksanakan kegiatan/belanja yang sama sesuai dengan yang direncanakan. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.24
Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis
Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN Rp.	REALISASI ANGGARAN Rp.	% REALISASI CAPAIAN ANGGARAN
1	Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik Pada Layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	16.450.691.628.00	15.818.525.486.00	96,16%
2	Meningkatnya Implementasi E-Government Pada Layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi	7.201.931.202.00	7.103.670.224.00	98,64%
3	Meningkatnya data statistik sektoral yang tersedia dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	Persentase Ketersediaan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	1.490.755.480.00	1.302.665.381.00	87,38 %
4	Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah Prov. Sulsel	Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)	612.458.996.00	535.836.776,00	87,49 %
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	14.129.205.362.00	13.576.505.5884,00	96,01 %
		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah			
		Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik			
		Persentase Temuan Material			

Tabel 3.25
Analisis Efisiensi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA %	PENYERAPAN ANGGARAN %	TINGKAT EFISIENSI %
1	Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik Pada Layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Nilai Keterbukaan Informasi Badan Publik	100 %	96,16%	3,84%
2	Meningkatnya Implementasi e-Government Pada Layanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase Aplikasi Pemerintahan yang Terintegrasi	100 %	98,64%	1,36%
3	Meningkatnya data statistik sektoral yang teredia dalam perencanaan dan evaluasi Pembangunan	Persentase data statistik sektoral yang tersedia dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	100 %	87,38%	12.62%
4	Meningkatnya Keamanan Informasi Daerah Prov. Sulsel	Indeks kematangan keamanan Informasi (KAMI)	100 %	87,49%	12.51%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	100 %	96,09%	3.91%
		Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah			
		Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik			
		Persentase Temuan Material			



BAB 4

PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018- 2023. Keberhasilan yang telah dicapai merupakan hasil dari kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sedangkan untuk target yang masih belum tercapai pada tahun ini perlu diantisipasi dan ditingkatkan pada tahun- tahun yang akan datang.

Hasil Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari Analisis sasaran strategis perangkat daerah secara keseluruhan tahun Anggaran 2021 dapat diketahui bahwa seluruh realisasi sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah mencapai target yaitu sebesar 100 % secara fisik dengan kriteria penilaian realisasi kinerja yaitu Sangat Baik.
2. Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 38.337.203.455,00** dengan persentase 96.12%.

Secara keseluruhan, pencapaian target pada tahun 2021 tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun masih terdapat beberapa permasalahan seperti Refocusing Anggaran.

4.2 Langkah -Langkah Peningkatan Kinerja

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan meningkatkan kerja sama yang baik dengan media elektronik (radio, televisi Media online) dalam pelaksanaan penyebaran informasi dan penerbitan / media cetak (surat kabar harian, tabloid, majalah dll) serta media luarruang (Baliho, Spanduk dll).

2. Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
3. Pemantauan dan pengawalan pelaksanaan rencana aksi pencapaian target setiap indikator kinerja yang diukur setiap triwulan.
4. Meningkatkan sinergi antar satuan kerja untuk mendorong tumbuhnya budaya kerja organisasi yang professional, akuntabel, mempunyai integritas dan inovatif.
5. Melakukan perbaikan sistem dan pengelolaan manajemen kinerja, baik di tingkat organisasi maupun di tingkat individu, sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi di Lingkungan Dinas komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan secara terus menerus.